



**PERATURAN DESA NGAMPEL WETAN
NOMOR : 08 TAHUN 2022**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA NGAMPELWETAN KECAMATAN
NGAMPEL KABUPATEN KENDAL**

Jl. Sunan Ampel Km.2 Desa Ngampel Wetan Kabupaten Kendal 51357



KEPALA DESA NGAMPEL WETAN

KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA NGAMPEL WETAN NOMOR 08 TAHUN 2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGAMPEL WETAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGAMPEL WETAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagai wujud dari pengelolaan keuangan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat ;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Camat Ngampel Nomor : 900/23/2022 Tanggal 27 Desember 2022 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Ngampel Wetan Tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023, Kepala Desa bersama BPD telah menyempurnakan hasil evaluasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ,huruf b dan huruf c perlu menetapkan Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2021 Tentang APBDes Tahun 2022;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

21. Peraturan Menteri , Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
22. Peraturan Menteri , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang pengelolaan Dana Desa
24. Permendes PDTT Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan DD Tahun 2022;
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan gubernur Nomor 48 tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 9 Seri A No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 148);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 21);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14)
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 53 Seri E No. 47);Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3;
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standarisasi Beaya Tahun 2019 dilingkungan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor. 45);

33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi dana di Kabupaten Kendal Penetapan Besaran Alokasi Dana Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No. 49);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ,Rencana Kegiatan Pembangunan, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Setiap Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 4);
37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi Kepala dan Perangkat di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6)sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap,Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala dan Perangkat di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 30);
38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang didanai dari Dana Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 19);
39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 62);
40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Standarisasi Biaya dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
42. Peraturan Bupati Kendal Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
43. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97)
44. Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal;
 45. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/57/2022 Tanggal 14 Februari 2022 Tentang Besaran Alokasi Dana Bagi Setiap di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
 46. Peraturan Desa Ngampelwetan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Di Ngampelwetan Kecamatan Ngampel (Lembaran Ngampelwetan Tahun 2019 Nomor 2);
 47. Peraturan Desa Ngampel Wetan No. 06 Tahun 2020 tentang RPJMDes Tahun 2020-2026.
 48. Peraturan Desa Ngampel Wetan Wetan No. 06 Tahun 2021 Tentang RKPDes Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAMPEL WETAN
Dan KEPALA DESA NGAMPEL WETAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGAMPEL WETAN TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kendal.
5. Pemerintahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan .
7. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala di Desa.
8. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.

9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Rencana Pembangunan Menengah selanjutnya disingkat RPJM adalah rencana kegiatan pembangunan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
12. Rencana Kerja Pemerintah selanjutnya disebut RKP adalah penjabaran dari RPJM untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngampel Wetan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan	:Rp. 1.924.276.552,-
2. Belanja	:Rp. 1.726.406.600,-
Surplus / Defisit	: Rp. 98.000.000,-
3. Pembiayaan	
a. Pengeluaran Pembiayaan	:Rp. 98.000.000 ,-
Pembiayaan Netto	: Rp. (98.000.000,-)
Sisa lebu/(kurang) perhitungan anggaran :	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagai landasan operasional pelaksanaan APB.

Pasal 5

- (1) Pemerintah dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan menk yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan tentang perubahan APB .
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah ;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan berskala lokal .

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB daberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan in dalam Lembaran Desa Ngampel Wetan

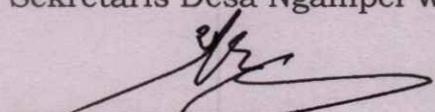
Ditetapkan di : Desa Ngampel Wetan
Pada Tanggal : 28 Desember 2022



Diundangkan di Desa Ngampel Wetan

Pada tanggal 28 Desember 2022

Sekretaris Desa Ngampel Wetan


MARDIYONO, S.Pd

LEMBARAN DESA NGAMPEL WETAN TAHUN 2022 NOMOR 08



KEPALA DESA NGAMPEL WETAN
KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL
PERATURAN KEPALA DESA NGAMPEL WETAN
NOMOR 09 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGAMPEL WETAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGAMPEL WETAN

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat :
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 2. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 3. Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Kendal;
 4. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/57/2022 Tentang
 5. Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
 6. Peraturan Desa Ngampelwetan Nomor 01 Tahun 2017 Tentang STOK;
 7. Peraturan Desa Ngampelwetan Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemakaian Tanah-Tanah Desa Ngampelwetan;
 8. Peraturan Desa Ngampelwetan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa;
 9. Peraturan Desa Ngampelwetan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Bumdes “ Berkah Sejahtera”;
 10. Peraturan Desa Ngampelwetan Nomor 08 Tahun 2022 tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGAMPEL WETAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	214.043.400,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.710.233.152,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	<u>1.924.276.552,00</u>
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	779.826.600,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	900.139.952,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	31.910.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	16.400.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	98.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp	<u>1.826.276.552,00</u>
Surplus/Defisit	Rp	<u>98.000.000,00</u>
3. Pembiayaan Desa		
a. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	98.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp	<u>(98.000.000,00)</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Ngampelwetan
Pada tanggal : 28 Desember 2022



Diundangkan di : Ngampelwetan
Pada tanggal : 28 Desember 2022
SEKRETARIS DESA

MARDIYONO, S.Pd

BERITA DESA NGAMPEL WETAN TAHUN 2021 NOMOR 09

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 08 /DS -Ngampel Wetan/2022

Nomor : 08 /BPD-Ngampel Wetan/2022

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA NGAMPEL WETAN

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa) TAHUN 2023

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **ABDUL MALIK** : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ngampelwetan Yang beralamat di Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **ABDUL KARIM** : Ketua BPD Desa Ngampelwetan
3. **JOKO** : Wakil Ketua BPD Desa Ngampelwetan
4. **DIAN KURNIAWATI** : Sekretaris BPD Desa Ngampelwetan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngampelwetan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati APBDesa Tahun 2023 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APB Desa Tahun 2023 Sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Barita Acara ini.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APBDesa Tahun 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Barita Acara ini selambat- lambatnnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandanganani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Ngampel selambat- lambatnnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngampelwetan, 28 Desember 2022

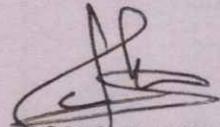
KEPALA Desa Ngampel Wetan



KETUA BPD Desa Ngampel Wetan

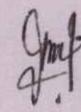


Wakil Ketua BPD
Desa Ngampel Wetan



JOKO SANTOSO

Sekretaris BPD
Desa Ngampel Wetan



DIAN KH

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH DESA NGAMPEL WETAN KECAMATAN NGAMPEL
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			1.924.276.552,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			214.043.400,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			214.043.400,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			214.043.400,00
	01. Tanah Kas Desa	PAD	1 Tahun 62.145.000,00	62.145.000,00
	02. Tanah Bengkok Kades dan Perangkat Desa	PAD	1 Tahun 151.898.400,00	151.898.400,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			0,00
4.1.4.90.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			0,00
	01. Bumdes	PAD	1 Tahun 0,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer			1.710.233.152,00
4.2.1.	Dana Desa			678.359.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			678.359.000,00
	01. Dana Desa APBN 2023	DDS	1 Tahun 678.359.000,00	678.359.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			60.000.000,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			60.000.000,00
	01. Pajak PBH	PBH	1 Tahun 50.000.000,00	50.000.000,00
	02. Retribusi	PBH	1 Tahun 10.000.000,00	10.000.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			322.004.200,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			322.004.200,00
	01. ADD 2023	ADD	1 Tahun 304.471.000,00	304.471.000,00
	02. Tambahan Siltap ke 13	ADD	1 Tahun 17.533.200,00	17.533.200,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			475.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			475.000.000,00
	01. Banprov	PBP	1 Tahun 475.000.000,00	475.000.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			174.869.952,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			174.869.952,00
	01. BKK 2023	PBK	1 Tahun 174.869.952,00	174.869.952,00
	JUMLAH PENDAPATAN			1.924.276.552,00



Kendal, 06 January 2023
SEKRETARIS DESA

(Signature)
MARDIYONO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA NGAMPEL WETAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	214.043.400,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.710.233.152,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.924.276.552,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	779.826.600,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	543.667.600,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	223.808.400,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	223.808.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.400.800,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	15.400.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	58.650.000,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.650.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.910.000,00	ADD, PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	780.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.130.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	3.400.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	19.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	61.249.200,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	61.249.200,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	90.649.200,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	90.649.200,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	112.145.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	112.145.000,00	PAD, PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	112.145.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	20.975.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	13.650.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.650.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.325.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.325.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	103.039.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	21.775.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.775.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.675.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.675.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	60.589.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.589.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	15.000.000,00	DDS
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>900.139.952,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	2.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	2.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	47.200.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	37.200.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	10.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	680.539.952,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	200.000.000,00	PBP
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	53.700.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	53.700.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	426.839.952,00	DDS, PBK, PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	426.839.952,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	170.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	170.000.000,00	PBP
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	170.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>31.910.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	2.000.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	22.000.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	20.000.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaa n Milik Desa	2.000.000,00	PBH
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7.910.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.910.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.910.000,00	
3.4.91		Pembinaan dan Operasional KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>16.400.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	11.400.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.495.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.495.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	4.925.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.925.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.980.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.980.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>98.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulanen Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	93.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	93.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.826.276.552,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	98.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	98.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(98.000.000,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Kendal, 06 January 2023

KEPALA DESA

KEPALA DESA
NGAMPEL WETAN

ABDUL MALIK

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGAMPEL WETAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran Peraturan Kepala Desa
Nomor : 9
Tahun : 2022

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
4.	PENDAPATAN					
4.1.	Pendapatan Asli Desa			214.043.400,00		
4.1.2.	Hasil Aset Desa			214.043.400,00		
4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			214.043.400,00		
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			0,00		
4.1.4.90	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			0,00		
4.2.	Pendapatan Transfer			1.710.233.152,00		
4.2.1.	Dana Desa			678.359.000,00		
4.2.1.01	Dana Desa			678.359.000,00		
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			60.000.000,00		
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			60.000.000,00		
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			322.004.200,00		
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			322.004.200,00		
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			475.000.000,00		
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			475.000.000,00		
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			174.869.952,00		
4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			174.869.952,00		
5.	JUMLAH PENDAPATAN			1.924.276.552,00		
01	BELANJA					
01.01.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			779.826.600,00		
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			543.667.600,00		

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		1	Tahun	46.200.000,00	ADD
1.01.01.	Belanja Pegawai				46.200.000,00	
1.01.01.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa				46.200.000,00	
1.01.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa				39.000.000,00	
1.01.01.	Tunjangan Kepala Desa				7.200.000,00	
1.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		1	Tahun	223.808.400,00	ADD
1.01.02.	Belanja Pegawai				223.808.400,00	
1.01.02.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa				223.808.400,00	
1.01.02.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa				188.931.600,00	
1.01.02.	Tunjangan Perangkat Desa				34.876.800,00	
1.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		1	Tahun	15.400.800,00	ADD
1.01.03.	Belanja Pegawai				15.400.800,00	
1.01.03.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa				15.400.800,00	
1.01.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa				2.246.400,00	
1.01.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa				13.154.400,00	
1.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PPKPD dan PPKD dll)		1	Tahun	58.650.000,00	ADD, PBH
1.01.04.	Belanja Barang dan Jasa				58.650.000,00	
1.01.04.	Belanja Barang Perengkapan				16.960.000,00	
1.01.04.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				5.516.000,00	
1.01.04.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan				3.544.000,00	
1.01.04.	Belanja Pakakaian Dinas/Seragam/Atribut				7.900.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Honorarium				40.250.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa				2.450.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Honorarium Petugas				16.800.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Honorarium PPKPD dan PPKD				21.000.000,00	
1.01.04.	Belanja Pemeliharaan				1.440.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan				
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	12	bulan	23.400.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			23.400.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			23.400.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			23.400.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1	Tahun	1.910.000,00	ADD, PBH
1.01.06.	5.1.	Belanja Pegawai			780.000,00	
1.01.06.	5.1.8.	Jaminan Ketenagakerjaan BPD			780.000,00	
1.01.06.	5.1.8.01	Jaminan Ketenagakerjaan Badan Permusyawaratan Desa			780.000,00	
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.130.000,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			1.130.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			380.000,00	
1.01.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1	Tahun	750.000,00	PBH
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1	Tahun	3.400.000,00	PBH
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.400.000,00	
1.01.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			3.400.000,00	
1.01.07.	5.2.1.99	Belanja Barang Perengkapan Lainnya			3.400.000,00	
1.01.08.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	1	Tahun	19.000.000,00	DDS
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			19.000.000,00	
1.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			19.000.000,00	
1.01.08.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			19.000.000,00	
1.01.91.		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	1	Tahun	61.249.200,00	PAD
1.01.91.	5.1.	Belanja Pegawai			61.249.200,00	
1.01.91.	5.1.5.	Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)			61.249.200,00	
1.01.91.	5.1.5.01	Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)			61.249.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.92.	Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkulu)		1	Tahun	90.649.200,00	PAD
1.01.92.	Belanja Pegawai				90.649.200,00	
1.01.92.	Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkulu)				90.649.200,00	
1.01.92.	Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkulu)				90.649.200,00	
01.02.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa				112.145.000,00	
1.02.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (**)		1	Tahun	112.145.000,00	PAD, PBP
1.02.03.	Belanja Modal				112.145.000,00	
1.02.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman				112.145.000,00	
1.02.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja				20.500.000,00	
1.02.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material				91.645.000,00	
01.03.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan				20.975.000,00	
1.03.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (**)		1	Tahun	13.650.000,00	DDS
1.03.02.	Belanja Barang dan Jasa				13.650.000,00	
1.03.02.	Belanja Barang Perlengkapan				200.000,00	
1.03.02.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk				200.000,00	
1.03.02.	Belanja Jasa Honorarium				13.450.000,00	
1.03.02.	Belanja Jasa Honorarium Petugas				13.450.000,00	
1.03.03.	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa		1	Tahun	2.325.000,00	ADD
1.03.03.	Belanja Barang dan Jasa				2.325.000,00	
1.03.03.	Belanja Jasa Honorarium				2.325.000,00	
1.03.03.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya				2.325.000,00	
1.03.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif		1	Tahun	5.000.000,00	DDS
1.03.05.	Belanja Barang dan Jasa				5.000.000,00	
1.03.05.	Belanja Barang Perlengkapan				5.000.000,00	
1.03.05.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya				5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
01.04.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan				
1.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1	Tahun	21.775.000,00	DDS
1.04.01.	Belanja Barang dan Jasa			21.775.000,00	
1.04.01.	Belanja Barang Perengkapan			18.000.000,00	
1.04.01.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			18.000.000,00	
1.04.01.	Belanja Jasa Honorarium			3.775.000,00	
1.04.01.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			3.775.000,00	
1.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1	Tahun	5.675.000,00	DDS
1.04.03.	Belanja Barang dan Jasa			5.675.000,00	
1.04.03.	Belanja Barang Perengkapan			1.000.000,00	
1.04.03.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.000.000,00	
1.04.03.	Belanja Jasa Honorarium			4.675.000,00	
1.04.03.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			4.675.000,00	
1.04.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1	Tahun	60.589.000,00	DDS
1.04.08.	Belanja Barang dan Jasa			60.589.000,00	
1.04.08.	Belanja Barang Perengkapan			47.839.000,00	
1.04.08.	Belanja Barang Perengkapan Lainnya			47.839.000,00	
1.04.08.	Belanja Jasa Honorarium			3.750.000,00	
1.04.08.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			3.750.000,00	
1.04.08.	Belanja Operasional Perkantoran			9.000.000,00	
1.04.08.	Belanja Jasa Langganan Listrik			4.800.000,00	
1.04.08.	Belanja Jasa Langganan Internet			4.200.000,00	
1.04.91.	Pengisian Perangkat Desa	1	Tahun	15.000.000,00	DDS
1.04.91.	Belanja Barang dan Jasa			15.000.000,00	
1.04.91.	Belanja Barang Perengkapan			15.000.000,00	
1.04.91.	Belanja Barang Perengkapan Lainnya			15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
02.01.	Sub Bidang Pendidikan				
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TK/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaiain dll)	1	Tahun	900.139.952,00	DDS
02.01.01	Belanja Barang dan Jasa			2.400.000,00	
02.01.01	Belanja Jasa Honorarium			2.400.000,00	
02.01.01	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			2.400.000,00	
02.02.	Sub Bidang Kesehatan			47.200.000,00	
2.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lansia, Insentif)	1	Tahun	37.200.000,00	DDS
2.02.02.	Belanja Barang dan Jasa			37.200.000,00	
2.02.02.	Belanja Barang Perlengkapan			30.000.000,00	
2.02.02.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			25.500.000,00	
2.02.02.	Belanja Pakaiain Dinas/Seragam/Attribut			4.500.000,00	
2.02.02.	Belanja Jasa Honorarium			7.200.000,00	
2.02.02.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			7.200.000,00	
2.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1	Tahun	10.000.000,00	DDS
2.02.03.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
2.02.03.	Belanja Barang Perlengkapan			10.000.000,00	
2.02.03.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			10.000.000,00	
02.03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			680.539.952,00	
2.03.01.	Pemeliharaan Jalan Desa	1	Tahun	200.000.000,00	PBP
2.03.01.	Belanja Modal			200.000.000,00	
2.03.01.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			200.000.000,00	
2.03.01.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			200.000.000,00	
2.03.03.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1	Tahun	53.700.000,00	DDS
2.03.03.	Belanja Modal			53.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
2.03.03.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			53.700.000,00	
2.03.03.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			53.700.000,00	
2.03.14.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	1	Tahun	426.839.952,00	DDS, PBK, PBP
2.03.14.	5.3.	Belanja Modal			426.839.952,00	
2.03.14.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			426.839.952,00	
2.03.14.	5.3.7.01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			2.400.000,00	
2.03.14.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			65.440.000,00	
2.03.14.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			354.499.952,00	
2.03.14.	5.3.7.04	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan			4.500.000,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			170.000.000,00	
2.04.11.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	1	Tahun	170.000.000,00	PBP
2.04.11.	5.3.	Belanja Modal			170.000.000,00	
2.04.11.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			170.000.000,00	
2.04.11.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			170.000.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			31.910.000,00	
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			2.000.000,00	
3.01.02.		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pempdes	1	Tahun	2.000.000,00	PBH
3.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00	
3.01.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00	
3.01.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.000.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			22.000.000,00	
3.02.01.		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	1	Tahun	20.000.000,00	DDS
3.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			20.000.000,00	
3.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			20.000.000,00	
3.02.01.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
3.02.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	1	Tahun	2.000.000,00	PBH
3.02.04.	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00	
3.02.04.	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00	
3.02.04.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.000.000,00	
03.04.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			7.910.000,00	
3.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1	Tahun	2.910.000,00	PBH
3.04.02.	Belanja Barang dan Jasa			2.910.000,00	
3.04.02.	Belanja Barang Perengkapan			2.510.000,00	
3.04.02.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			210.000,00	
3.04.02.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			100.000,00	
3.04.02.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			600.000,00	
3.04.02.	Belanja Pakain Dinas/Seragam/Atribut			1.600.000,00	
3.04.02.	Belanja Jasa Honorarium			400.000,00	
3.04.02.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			400.000,00	
3.04.91.	Pembinaan dan Operasional KPMD	1	Tahun	5.000.000,00	PBP
3.04.91.	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
3.04.91.	Belanja Barang Perengkapan			5.000.000,00	
3.04.91.	Belanja Barang Perengkapan Lainnya			5.000.000,00	
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			16.400.000,00	
04.03.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			11.400.000,00	
4.03.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1	Tahun	2.495.000,00	DDS
4.03.01.	Belanja Barang dan Jasa			2.495.000,00	
4.03.01.	Belanja Barang Perengkapan			245.000,00	
4.03.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			25.000,00	
4.03.01.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			120.000,00	
4.03.01.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	

KODE REKENING	1	2	URAIAN	3	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
					4	5		
4.03.01.	5.2.2.		Belanja Jasa Honorarium				1.250.000,00	
4.03.01.	5.2.2.04		Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				1.000.000,00	
4.03.01.	5.2.2.08		Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis				250.000,00	
4.03.01.	5.2.4.		Belanja Jasa Sewa				1.000.000,00	
4.03.01.	5.2.4.01		Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang				1.000.000,00	
4.03.02.			Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		1	Tahun	4.925.000,00	DDS
4.03.02.	5.2.		Belanja Barang dan Jasa				4.925.000,00	
4.03.02.	5.2.1.		Belanja Barang Perlengkapan				675.000,00	
4.03.02.	5.2.1.01		Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				175.000,00	
4.03.02.	5.2.1.06		Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				400.000,00	
4.03.02.	5.2.1.08		Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk				100.000,00	
4.03.02.	5.2.2.		Belanja Jasa Honorarium				3.250.000,00	
4.03.02.	5.2.2.04		Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				1.500.000,00	
4.03.02.	5.2.2.08		Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis				1.750.000,00	
4.03.02.	5.2.4.		Belanja Jasa Sewa				1.000.000,00	
4.03.02.	5.2.4.01		Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang				1.000.000,00	
4.03.03.			Peningkatan Kapasitas BPD		1	Tahun	3.980.000,00	DDS
4.03.03.	5.2.		Belanja Barang dan Jasa				3.980.000,00	
4.03.03.	5.2.1.		Belanja Barang Perlengkapan				480.000,00	
4.03.03.	5.2.1.01		Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				100.000,00	
4.03.03.	5.2.1.06		Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				280.000,00	
4.03.03.	5.2.1.08		Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk				100.000,00	
4.03.03.	5.2.2.		Belanja Jasa Honorarium				2.500.000,00	
4.03.03.	5.2.2.04		Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				1.500.000,00	
4.03.03.	5.2.2.08		Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis				1.000.000,00	
4.03.03.	5.2.4.		Belanja Jasa Sewa				1.000.000,00	
4.03.03.	5.2.4.99		Belanja Jasa Sewa Lainnya				1.000.000,00	

KODE REKENING	1	2	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
				4 VOLUME	5 SATUAN		
04.04.							
04.04.02.			Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak			5.000.000,00	DDS
4.04.02.		5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1	Tahun	5.000.000,00	
4.04.02.		5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.000.000,00	
4.04.02.		5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			5.000.000,00	
05			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			98.000.000,00	
05.01.			Sub Bidang Penanggulangan Bencana			5.000.000,00	
5.01.00.			Kegiatan Penanggulangan Bencana	1	Tahun	5.000.000,00	DDS
5.01.00.		5.4.	Belanja Tidak Terduga			5.000.000,00	
5.01.00.		5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			5.000.000,00	
5.01.00.		5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			5.000.000,00	
05.03.			Sub Bidang Keadaan Mendesak			93.000.000,00	
5.03.00.			Penanganan Keadaan Mendesak	12	Bulan	93.000.000,00	DDS
5.03.00.		5.4.	Belanja Tidak Terduga			93.000.000,00	
5.03.00.		5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			93.000.000,00	
5.03.00.		5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			93.000.000,00	
			JUMLAH BELANJA			1.826.276.552,00	
			SURPLUS DEFISIT			98.000.000,00	
			PEMBIAYAAN				
6.			Pengeluaran Pembiayaan			98.000.000,00	
6.2.			Penyertaan Modal Desa			98.000.000,00	
6.2.2.			Penyertaan Modal Desa			98.000.000,00	
6.2.2.01			PEMBIAYAAN NETTO			98.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1		4	5	6	7
2					
	SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

